



Kejati Minta Camat dan Lurah Garda Terdepan Cegah Korupsi

Kejati Minta Camat dan Lurah Garda Terdepan Cegah Korupsi

MAKASSAR, UPEKS—Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel gelar Penyuluhan Hukum Anti Korupsi dengan tema, "Budaya Siri So Lusi Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan", di Balaikota Makassar, Rabu (25/9/2024).

Kepala Seksi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi hadir memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah tindak pidana korupsi di jajaran Pemkot Makassar.

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis hadir membuka langsung kegiatan penyuluhan yang dihadiri perangkat camat, lurah dan staf Pemkot Makassar. Dia memberikan apresiasi kepada tim Penkum Kejati Sulsel yang hadir memberikan penyuluhan hukum.

"Ini upaya mitigasi atau cegah dini terhadap tindak korupsi. Saya minta perangkat camat dan lurah untuk serius mengikuti kegiatan ini. Jangan diangap seremonial dan cuma datang duduk sambil main Hp," kata Arwin Azis.

Pjs Walikota Makassar berharap, camat dan lurah yang jadi garda terdepan memberikan pelayanan ke masyarakat bisa tercerahkan soal bahaya laten tindak pidana korupsi.



JAYAUPEKS

KOMPAK. Kepala Seksi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi dan Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis kompak foto bersama perangkat camat, lurah dan staf Pemkot yang mengikuti Penyuluhan Hukum Anti Korupsi di Balaikota Makassar, Rabu (25/9/2024).

"Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih ada di skor 34, pada posisi 115 dari 180 negara. Korupsi ini sudah masuk kategori extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa," sebut Arwin Azis.

Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi mengajak seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar agar menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi di pemerintahan.

"Bapak dan Ibu sekalian adalah pemangku jabatan yang rawan terjerat dalam persoalan korupsi. Karena ada jabatan, uang dan aset negara yang di kelola. Karena itu, kami perlu ingatkan," kata Soetarmi dihadapan sekitar 200 peserta penyuluhan hukum.

Sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan korupsi di Pemkot Makassar, Soetarmi meminta perangkat camat dan lurah mengambil filosofi budaya 'Siri' yang ada di Sulsel.

"Budaya Siri' ini adalah falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Bugis-Makassar yang memiliki makna rasa malu dan pendorong untuk bekerja dan berusaha sebaik mungkin," terang Soetarmi m

"Kalau sudah tersandung korupsi, maka bukan hanya sanksi penjara dan denda, tapi juga ada sanksi sosial di masyarakat. Akan bikin malu pribadi, keluarga dan instansi," sambungnya.

Kepada jajaran Pemkot Makassar, Kasi Penkum memberikan beberapa tips menghindari perilaku korupsi. (jay/hms)